

Framing Khalayak dan Media Pasca Pemblokiran Akses Internet

Dinar Safa Anggraeni^a

Irwansyah^b

^aUniversitas Indonesia, Indonesia

^bUniversitas Indonesia, Indonesia

dinarsafa@gmail.com

Diterima tanggal 7 Juli 2019,
Direvisi tanggal 10 Januari 2020,
Disetujui tanggal 1 Februari 2020

Abstrak. Pasca terjadi kerusuhan dalam aksi Gerakan Nasional Kedulatan Rakyat (GNKR) 22 Mei 2019 di Jakarta, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk membatasi aktivitas internet khususnya di media sosial untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama peredaran info hoax. Namun hal ini dianggap telah mencederai freedom of Information Communication Technology (ICT) masyarakat yang memiliki hak mendapatkan informasi dari mana pun. Media sosial yang tidak bisa difungsikan antara lain WhatsApp, Instagram dan Facebook, kecuali Twitter. Alhasil masyarakat dipaksa mengkonsumsi berita dari media massa mainstream yang saat ini dianggap tidak independent karena para pemilik media telah terafiliasi dengan kepentingan pemerintah. Masyarakat yang aktif membagikan informasi di media sosial atau user generated content (UCG) mengalami kendala dalam mengakses dan mengekspresikan informasi di media sosial. Maka berdampak pada masyarakat internet atau netizen yang hanya bisa mendapatkan informasi dari media massa mainstream dan hanya sedikit yang bisa mengakses media sosial melalui virtual privat network (VPN) atau membuka media sosial Twitter yang tidak diblokir. Hal ini menjadikan framing yang diciptakan khalayak dan media massa mainstream menjadi tidak jauh berbeda terkait peristiwa tersebut.

Kata kunci: Internet, pemblokiran, framing, hasil pemilu

Abstract. After the riots in the action of the National Caring Movement (GNKR) on May 22, 2019 in Jakarta, the Indonesian Government decided to limit internet activities especially on social media to avoid undesirable things, especially circulation of hoax information. However, this is considered to have hurt the freedom of Information Communication Technology (ICT) of the people who have the right to get information from anywhere. Social media that cannot be used include WhatsApp, Instagram and Facebook, except Twitter. As a result, people are forced to consume news from mainstream mass media which is currently considered not independent because media owners have been affiliated with government interests. People who actively share information on social media or user generated content (UCG) experience problems in accessing and expressing information on social media. Then it has an impact on the internet community or netizens who can only get information from mainstream mass media and only a few can access social media through virtual private networks (VPN) or open social media Twitter that is not blocked. This makes framing created by the public and mainstream mass media not much different in relation to the event.

Keywords: Internet, blocking, framing, election results

*Penulis Korespondensi

Institusi dan Alamat Institusi

Nomor Handphone Penulis Korespondensi : +628987360069

: Dinar Safa Anggraeni

: Universitas Indonesia, Jl. Salemba Raya Gedung ISTH

PENDAHULUAN

Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat yang terjadi pada tanggal 21-22 Mei di Jakarta merupakan bentuk protes masyarakat atas hasil pengumuman pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) Indonesia 2019 yang dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan Ma'aruf Amin. Aksi ini menjadi sangat masif karena sebelumnya Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Amien Rais menyerukan akan ada gerakan *people power* jika terbukti ada kecurangan dalam Pilpres 2019 ini. Namun karena mendapatkan banyak kecaman dan kriminalisasi serta tuduhan makar pada aksi ini, Amien Rais mengganti nama aksi ini menjadi Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat sebagai bentuk protes rakyat terhadap hasil pemilu yang dianggap memiliki kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif. Imbasnya terjadi aksi demonstrasi besar-besaran di depan Gedung Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sejak tanggal 21-22 Mei 2019. Pada mulanya aksi ini berjalan damai, tidak ada tindakan anarkis, peserta pun sangat mudah dikondisikan. Pada tanggal 21 agenda para demonstran yakni menyampaikan pendapat dan orasi dari setiap perwakilan organisasi, kemudian dilanjut dengan acara tausiah, buka puasa dan sholat tarawih berjamaah hingga pukul 21.00 WIB.

Setelah aksi selesai, polisi segera menyuruh peserta aksi kembali ke rumahnya masing-masing secara tertib dan kondusif. Namun menjelang pukul 23.00 WIB massa misterius muncul di depan Gedung Bawaslu, kemudian massa yang tidak jelas asalnya itu melakukan tindakan provokatif dan anarkis. Massa tersebut berusaha merusak *security barrier* dan memprovokasi petugas, kemudian petugas TNI dan Polri menghalau tapi massa malah menyerang petugas dan didorong hingga Jalan Sabang dan Wahid Hasyim. Pada pukul 02.45 WIB kembali muncul kelompok massa misterius lain di jalan KS Tubun. Total ada 58 orang yang berhasil diamankan di wilayah tersebut. Kemudian pukul 03.00 WIB kembali ada puluhan massa misterius di Jalan KS Tubun, Petamburan, Jakarta Pusat. Para massa pun menyerang Asrama Brimob dengan batu, bom molotov, petasan dan botol. Aksi massa ini terus berlangsung hingga malam hari di tanggal 22 Mei 2019. Total ada 8 nyawa tewas akibat aksi anarkis antara massa misterius dan pihak kepolisian.

Sebenarnya ketegangan demokrasi di Indonesia suda dimulai sejak adanya *Presidential Threshold* yang menjadikan calon presiden yang akan bertarung di tahun 2019 hanya ada di dua kubu yaitu Jokowi-Ma'aruf dan Prabowo-Sandi. Selain itu karena mamasuki era digital dan kekuatan media sosial, masyarakat dengan mudah terpapar polarisasi internet yang semakin mempertajam terbelahnya dua kubu ini. Hal ini bisa terjadi karena media sosial dapat membaca perilaku masyarakat mengenai kesukaannya, sehingga masyarakat akan terus diberikan informasi dengan dengan sepihak sesuai dengan apa yang ia minati. Media sosial berkerja dengan cara memfungsikan algoritma penggunaanya dengan otomatis.

Algoritma ini membentuk polarisasi yang semakin tajam, akibatnya banyaklah timbul informasi yang bersifat *post-truth* dan *hoax*. *Post-truth* adalah sebuah "pembenaran" dari suatu hal yang belum tentu benar. *Post-truth* sangat sukses di media sosial dan berdampak pada mudahnya masyarakat terpengaruh akan informasi yang bersifat "pembenaran", bukan informasi yang sifatnya benar. Selain itu juga ada informasi bohong atau disebut dengan *hoax* yang sering disebarkan secara masif di media sosial. Hal inilah yang telah memperkeruh keadaan stabilitas masyarakat Indonesia jelas Pilpres 2019.

Menjelang tahun politik pemerintah dengan mudah membatasi kebebasan berpendapat masyarakat, maka terlihat keputusan pemerintah begitu represif terhadap masyarakat. Menggunakan UU ITE pemerintah dengan mudah dapat mengadili siapa saja yang melakukan ujaran kebencian, kebohongan, perlawanan dan lainnya dengan dalih menegakkan undang-undang. Telah banyak korban yang terjerat kriminalisasi akibat perkataanya yang disebut melanggar UU ITE yang sering disebut dengan "pasal karet" ini. Hal ini sangat bertolak belakang dengan hak masyarakat dalam berserikat, berkumpul dan berpendapat di muka umum dalam UUD Pasal 28 1945.

Puncaknya pada tanggal 22 Mei 2019, terjadi kerusuhan hebat di Jakarta. Pemerintah memutuskan untuk membatasi akses media sosial dengan alasan mencegah adanya berita bohong atau *hoax* yang akan

tersebar. Namun hal ini diprotes oleh Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI) yang mengatakan bahwa kebijakan ini tidak sesuai dengan pasal 28 F UUD 1945 dan pasal 19 Deklarasi Umum HAM yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi.

Sementara hak atas kebebasan berekspresi adalah hak fundamental, dan tidak dijamin ketentuan absolut. Pelaksanaan hak yang disediakan untuk tugas dan tanggung jawab. Dengan tujuan untuk menghormati hak atau reputasi orang lain, untuk perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau moral (Centre, Road, & Ec, 2013).

Akibat kebijakan ini, masyarakat dipaksa hanya mendapatkan informasi melalui media massa *mainstream*. Namun saat ini banyak orang yang tidak lagi percaya dengan bingkai berita (*framing*) yang dibuat oleh media massa *mainstream* karena sebagian besar pemiliknya telah terafiliasi dengan pemerintah. Hal ini menjadikan banyak masyarakat yang menggunakan *virtual privat network* (VPN) agar mendapatkan akses secara bebas dengan media sosial yang terblokir. Tanpa VPN masyarakat pun masih bisa menggunakan media sosial alternatif seperti Twitter dan Telegram. Tingginya partisipasi masyarakat dalam menyebarkan informasi di media sosial telah membentuk sebuah *framing*-nya sendiri yang sering kali berbeda dengan *framing* yang ada di media massa *mainstream*.

Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan *framing* yang dibentuk warganet sebagai *user generated content* (UGC) di media sosial Twitter pasca tragedi 22 Mei dengan berita yang ada di tiga Media Massa Online peringkat tertinggi Alexa yaitu Detik.com, Liputan6.com, dan Kompas.com. Penelitian ini menggunakan metode konten analisis yang dapat menunjukkan hal apa yang dianggap penting oleh masyarakat dan hal apa yang dianggap penting oleh media.

Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
Jie Qin (Qin, 2015)	Hero on Twitter, Traitor on News: How Social Media and Legacy News Frame Snowden	Frame di media sosial menggambarkan Edward Snowden sebagai pahlawan sementara bingkai berita pada masa lalu dibingkai sebagai pengkhianat. Pembelajaran bingkai media yang diidentifikasi lebih lanjut di media sosial dan berita lama berbeda dalam dua cara: pemilihan kata dan arti-penting kata.	Penelitian ini menggambarkan apa <i>framing</i> yang dibentuk media sosial dan apa yang dibentuk media massa tentang Edward Snowden. Dalam penelitian ini digunakan metode <i>semantic network analysis</i> pada Twitter.
Lestari Nurhajati, Xenia Angelica Wijayanto (Nurhajati & Wijayanto, 2018)	Framing Media Online Atas Pemberitaan Isu Politik Uang Dalam Pilkada Serentak 2018	Secara umum media memiliki <i>framing</i> yang tidak jauh berbeda satu sama lain. Meski pemilik media dan kebijakan media berbeda, namun rata-rata media menyajikan berita politik uang di Pilkada dengan “tone”	Penelitian ini menggunakan metode analisis isi hanya pada media massa online.

		nada berita yang tidak jauh berbeda, rata-rata netral.	
Hemphill dan Heston (Hemphill & Heston, 2013)	Framing in Social Media: How the US Congress Uses Twitter Hashtags to Frame Political Issues	Para politisi menggunakan tagar untuk membingkai diskusi kebijakan. Dengan kekuatan media sosial mereka dapat melakukannya tanpa mengandalkan media tradisional. Penelitian ini menemukan korelasi yang kuat antara upaya framing politisi, hasil penelitian menunjukkan bahwa politisi berbicara dan memilih sepanjang garis yang terpolarisasi.	Penelitian ini menganalisis framing yang dilakukan oleh politisi menggunakan metode kombinasi manual dan dibantu komputer pendekatan untuk menganalisis konten dan struktur.

Konsep Internet dan Demokrasi

Internet merupakan teknologi yang memungkinkan terciptanya negara demokrasi dengan cara memperkuat kekuasaan dan juga mengkritisi kekuasaan. Internet menjadi sebuah platform komunikasi yang digunakan para aktivis dalam mengekspresikan pendapatnya di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial telah memicu bangkitnya kembali fungsi pengawasan media, serta membuka jalan bagi media untuk bertindak sebagai pilar keempat demokrasi memantau pelanggaran politik yang dilakukan oleh sebuah rezim (Zaid, 2017).

Internet melalui jurnalisme warga telah melemahkan kekuatan media pemerintah yang mengendalikan sebagian besar konten berita dan hiburan. Abdulla (2011) menyatakan bahwa internet telah menawarkan kemungkinan untuk kehidupan yang lebih demokratis dan lebih banyak partisipasi warga negara. Dia berpendapat media sosial tidak hanya memfasilitasi organisasi politik dan mobilisasi, media sosial juga menyediakan model demokrasi yang bersifat inklusif, keterbukaan dan egalitarianisme (Zaid, 2017).

Namun, internet juga memiliki tiga keprihatinan utama terkait dengan dampak melemahkan Internet yaitu pengawasan pemerintah. Dalam sebuah artikel 'Kekuatan dalam era Internet feodal', (Schneier, 2013 dalam Zaid, 2017) menggambarkan gambaran suram dari internet saat ini dan masa depan. Dia berpendapat bahwa pertempuran untuk mendapatkan kekuasaan di dunia maya sedang dimenangkan oleh kekuatan institusional seperti pemerintah dan perusahaan multinasional besar. Jumlah pengawasan, ketersediaan *spyware*, jumlah data yang dikumpulkan pada setiap individu dan bagaimana informasi ini dapat digunakan menjadikan internet tidak efisien dan tidak demokratis (Zaid, 2017). Karena keselarasan kepentingan mereka dan kepentingan pemerintah, data ini dibagi tidak hanya dengan pengiklan tetapi juga berpotensi dengan aparat keamanan pemerintah. Pemerintah dapat menggunakan internet untuk meredam kebebasan berekspresi dan menekan aktivisme *online*.

Internet untuk Masyarakat

Media digital mengubah taktik gerakan demokrasi, serta teknologi informasi dan komunikasi memainkan peran utama dalam perilaku politik masyarakat. Dalam masa krisis politik, perusahaan teknologi mungkin "condong ke depan" dengan alat atau aplikasi baru yang diperkenalkan untuk melayani publik yang bersemangat dengan tujuan merebut pangsa pasar. Pada akhir Januari, misalnya, Google

mempercepat peluncuran *Speak2Tweet*, sebuah aplikasi yang dirancang untuk menerjemahkan panggilan telepon ke dalam pesan teks sebagai cara untuk melewati blokade di Twitter. Beberapa perusahaan teknologi membangun portal khusus untuk memungkinkan pengguna dalam negeri berbagi konten. Tetapi seperti yang Evgeny Morozov tunjukkan, teknologi informasi dan bisnis yang mendesainnya tidak selalu berakhir mendukung gerakan demokratisasi (Howard & Hussain, 2011).

Di negara-negara di mana pemerintah otoriter runtuh atau membuat konsesi besar, sulit untuk mengetahui apakah demokrasi yang stabil akan muncul. Gelombang demokratisasi diukur dalam tahun, bukan bulan. Pada tahun 1998, Soeharto Indonesia jatuh ketika para mahasiswa yang menggunakan ponsel berhasil memobilisasi dan membuat rezimnya lengah, tetapi butuh satu dekade percakapan politik yang sulit agar praktik demokrasi menjadi tertanam (Howard & Hussain, 2011).

Kebebasan

Dalam dunia digital, kebebasan dapat dikaitkan dengan kebebasan untuk berekspresi dan kebebasan mengakses internet. Internet menjadi ruang baru bagi individu untuk berekspresi dan mencari informasi. Meskipun internet adalah protokol yang sebagian besar terbuka, negara telah melakukan upaya untuk membatasi dan bahkan kadang-kadang menghalangi kebebasan dalam internet (Howard, 2011 dalam Gainous, Wagner, & Gray, 2016). Upaya-upaya untuk membatasi internet memiliki hasil yang beragam, tetapi lingkungan online tunduk pada pengaruh dan kontrol oleh aktor-aktor politik berpengalaman yang berusaha membela negara atau mempertahankan *status quo* (Gainous et al., 2016). Kontrol internet yang paling berat sering kali merupakan peraturan yang dibuat oleh negara (Deibert et al., 2008 dalam Gainous et al., 2016). Dengan membatasi informasi yang tersedia, kontrol negara terhadap internet di dalam suatu negara membatasi utilitas untuk perubahan.

Membatasi internet tidak mudah dilakukan. Bahkan dengan kontrol canggih dan blokir pada situs web atau portal tertentu di internet, masih ada cara untuk mengatasi filter, seperti *proxy* dan enkripsi (Chadwick, 2006 dalam Gainous et al., 2016). Beberapa kasus pembatasan yang dilakukan oleh negara diantaranya adalah China, negara Timur Tengah, dan Indonesia sendiri. Contoh paling jelas dari hal ini adalah Cina di mana kontrolnya yang efisien tidak hanya mengarah pada lingkungan yang dibatasi oleh negara, tetapi juga internet yang kadang-kadang dapat dilihat sebagai sumber propaganda pemerintah (Masterson, 2014 dalam Gainous et al., 2016). Pembatasan internet berupa penyaringan juga sesuatu yang rutin dilakukan di Negara-negara Timur Tengah (Wagner dan Gainous, 2013 dalam Gainous et al., 2016). Internet dapat mengubah lanskap politik suatu negara dengan mengubah sifat dan biaya komunikasi. Ini dapat memberi orang dan politisi tempat baru untuk terlibat satu sama lain dan negara, dan dengan demikian, memperluas ruang politik sambil meningkatkan nilai-nilai dan kegiatan demokrasi (Allison, 2002 dalam Gainous et al., 2016). Internet adalah forum baru untuk diskusi dan interaksi politik, karena menyediakan forum terbuka untuk aktor politik, kelompok kepentingan, dan pihak ketiga (Norris, Norris, Bennett, & Entman, 2001). Hal ini dapat mengubah sifat dan fungsi sistem politik, karena kelompok luar dapat menghadirkan citra canggih di internet meskipun sumber daya terbatas (Ward et al., 2003; Schneider and Foot, 2002 dalam Gainous et al., 2016). Di negara-negara dengan media terbatas atau media yang didominasi negara, efek ini sangat besar karena internet menjadi satu-satunya jalan untuk pesan yang berlawanan dan berbeda (Gainous et al., 2016)

Berita Sosial, Jurnalisme Warga dan Imajinasi Demokrasi

Dalam sebuah mediascape yang memiliki banyak kelangkaan informasi, kekuatan khalayak dapat berperan penting dalam melakukan penyebaran informasi seperti jurnalisme warga (Goode, 2009). Kemampuan khalayak dalam berpartisipasi di ruang publik telah memberikan pilihan lain dalam mengkonsumsi berita yang dahulu hanya dari media massa *mainstream*. Daya tarik dari perilaku demokrasi jurnalisme warga di media *online* telah mengurangi kelangkaan dan juga meningkatkan partisipasi warga dalam melakukan proses penetapan *agenda setting* di media sosial.

Gerakan jurnalisme warga tidak menandakan akhir dari penetapan *agenda setting* oleh organisasi media profesional atau *elite*. Institusi semacam itu masih mematahkan dan membingkai sebagian besar

berita yang beredar melalui ranah *online* dan ini tidak mungkin berubah di masa mendatang. Tetapi lembaga-lembaga itu sekarang harus bersaing untuk mendapatkan perhatian dalam persaingan dengan beragam sumber berita alternatif (Goode, 2009).

Teori dan Penelitian Pembingkai Berita

Pembingkai berita memiliki metafora seperti sebuah bingkai-gambar yang dapat digunakan untuk menjelaskan pembingkai berita (Tuchman, 1978 dalam Du, 2016). Ghanem (1997) menggambarkan kerangka berita sebagai ide pengorganisasian pusat konten berita yang memasok konteks dan menyarankan masalah apa yang akan diseleksi, ditekankan, dikecualikan, dan dielaborasi. Akhirnya, bingkai, atau perspektif, yang digunakan wartawan menarik perhatian pada atribut tertentu dari objek liputan berita dan mempengaruhi bagaimana orang memahami, mengingat, mengevaluasi, dan bertindak atas suatu masalah (Brewer, Graf, & Willnat, 2003; McCombs, 2005; Perlmutter, 2007; Wanta, Golan, & Lee, 2004; Weaver, 2007 dalam Du, 2016).

Meskipun media berita dan praktisi berita seharusnya mengaku obyektif, netral, dan tidak memihak, mereka tidak beroperasi dalam kekosongan sosial, politik, atau ideologis. Tidak ada sistem pengumpulan-berita dan pelaporan yang pada dasarnya non-ideologis, apolitis, atau non-partisan, sehingga diharapkan ada perbedaan dalam cakupan berita (McQuail, 1992). Akhavan-Majid dan Ramaprasad (1998) telah mengamati bahwa salah satu dari sedikit kepastian yang dihasilkan oleh enam dekade penelitian dalam komunikasi massa adalah diktum bahwa berita adalah produk yang dibuat secara sosial, bukan cerminan dari realitas objektif (Du, 2016). Menurut Tuchman (1978), bingkai berita seringkali tidak didasarkan pada nilai-nilai internal individu, tetapi lebih pada nilai-nilai eksternal seperti norma sosial, kendala organisasi, dan tekanan kelompok kepentingan (Du, 2016).

Framing merupakan cara pandang memaknai sebuah peristiwa atau isu. Framing dapat ditemukan di banyak tempat seperti di dalam teks media, jurnalis, ruang redaksi media, elit politik, pengambil kebijakan, pengamat politik, individu dan masyarakat (Entman, 1993). Framing juga dibagi menjadi empat tahapan yaitu framing dalam ruang redaksi, framing dalam teks berita, framing individual dan framing sosial (Vreese, 2005).

Framing dalam ruang redaksi bisa terdiri dari individu jurnalis, faktor internal dan faktor eksternal. Framing dalam teks berita adalah bingkai media atas suatu isu atau peristiwa. Framing individual adalah bentuk pemrosesan informasi, efek pada pengetahuan, efek pada sikap dan efek pada perilaku. Sedangkan framing pada masyarakat sosial bisa berdampak pada organisasi dan gerakan sosial (Vreese, 2005).

Efek bingkai pemberitaan media telah banyak dikaji oleh para ahli. Studi-studi tersebut memperlihatkan bagaimana bingkai pemberitaan atas suatu isu bisa mempengaruhi pengetahuan dan penilaian individu. Menurut Vreese (2005), studi mengenai efek framing bisa dikategorikan ke dalam dua jenis. Pertama, studi dengan menggunakan isu spesifik (*issue-specific news frames*). Peneliti mengkaji efek *framing* dengan mengambil isu tertentu yang spesifik. Isu yang diambil umumnya merupakan isu aktual yang banyak dibicarakan atau kontroversial di dalam masyarakat. Kedua, studi dengan menggunakan isu umum (*generic news frames*). Pada kategori ini, untuk mengukur efek framing, peneliti tidak mengambil isu yang spesifik tetapi menggunakan isu umum seperti soal toleransi, demokrasi, kebebasan berpendapat, Pemilu dan sebagainya.

Hashtags sebagai Framing di Media Sosial

Tagar adalah kata atau frasa dengan simbol hash "#." Misalnya, "#wikileaks" adalah hashtag untuk menyorot tweet ini tentang WikiLeaks. Dalam praktiknya, pengguna Twitter didorong untuk menambahkan tagar tweet mereka untuk meningkatkan visibilitas dalam pencarian Twitter (Qin, 2015). Tagar merupakan teks dan metatext, informasi dan tag, pragmatis dan ucapan metapragmatik. Hashtag khusus seperti #2019GantiPresiden atau #2019TetapJokowi telah digunakan untuk mengidentifikasi kejadian terkait diskusi di media sosial. Namun, penelitian tentang tagar sebagai perangkat framing baru saja muncul (Qin, 2015).

Penelitian (Hemphill & Roback, 2014) adalah di antara badan penelitian yang muncul ini Tagar Twitter sebagai perangkat pembingkai. Para penulis melakukan pendekatan algoritmik untuk mendeteksi bagaimana politisi menggunakan tagar untuk membingkai masalah apa dan mengidentifikasi empat puluh topik berdasarkan 10.546 tagar. Misalnya, pengguna menambahkan tagar seperti "#ACA" dan "#Obamacare" di tweet mereka ketika mereka berbicara tentang masalah perawatan kesehatan. Penelitian (Hemphill & Roback, 2014) menyentuh karakter penting dari tagar, yaitu banyak tagar dapat muncul terkait masalah kompleks.

Pertanyaan Penelitian

RQ1: Bagaimana dampak pemblokiran internet pada Gerakan Kedaulatan Rakyat 22 Mei 2019 dalam membentuk framing khalayak di media sosial dan framing berita di media massa mainstream?

H1: Adanya perbedaan framing khalayak di media sosial dan framing berita di media massa mainstream pasca pemblokiran internet pada Gerakan Kedaulatan Rakyat 22 Mei 2019.

H2: Framing khalayak di media sosial dan framing berita di media massa mainstream memiliki kesamaan pasca pemblokiran internet pada Gerakan Kedaulatan Rakyat 22 Mei 2019.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini paradigma penelitian yang dilakukan adalah paradigma positivis dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu kejadian. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi dengan meneliti isi pesan media dengan cara yang sistematis dan kuantitatif.

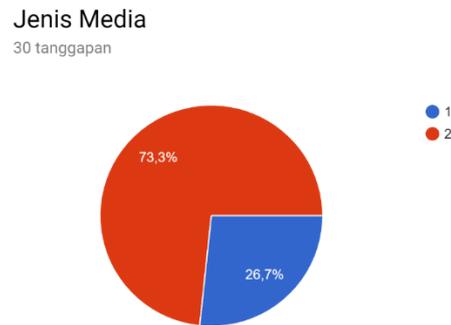
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek penelitian yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji wilayah penelitian ini menggunakan metode analisis isi dengan populasi *trending topic* konten di sosial media Twitter yang berupa tagar untuk mengetahui framing khalayak. Sedangkan untuk mengetahui framing yang dibentuk media massa penelitian ini menggunakan populasi *trending* berita pada tiga media online ranking tertinggi di Alexa yaitu Detik.com, Liputan6.com, dan Kompas.com. Seluruh sample konten yang ada di Twitter, Detik.com, Liputan6.com, dan Kompas.com diambil sejak penetapan kebijakan pemerintah membatasi jaringan media sosial dalam 24 jam. Total sample yang diteliti dalam penelitian ini adalah 30 konten berita di media massa dan media sosial.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tabel 1 menunjukkan total terdapat dua jenis media yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu media sosial dan media massa online. Total konten yang dianalisis dari media sosial berjumlah 8 *trending topic*, sedangkan total konten yang dianalisis pada media massa online ada sebanyak 22 berita yang menjadi trending atau paling banyak dibaca oleh khalayak.

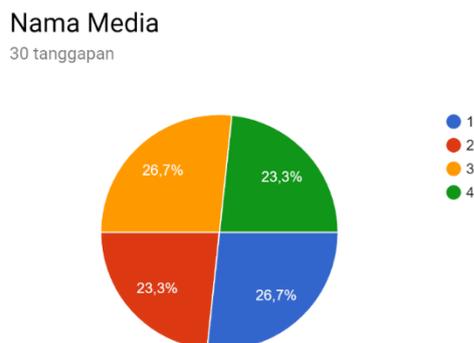
Tabel 1
Jenis Media



Sumber data: Analisis Peneliti

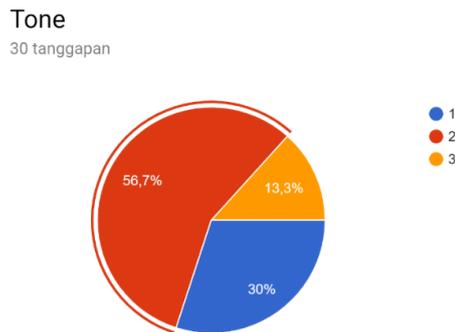
Tabel 2 menunjukkan perbandingan jumlah konten dengan setiap nama media. Media pertama merupakan media sosial Twitter yang menjadi satu-satunya media massa *Over The Top (OTT)* yang bisa digunakan selama diberlakukannya pembatasan akses media sosial di Indonesia. Dari konten yang ada di twitter, didapatkan 8 topik yang menjadi trending sepanjang masa kerusuhan tanggal 22 Mei 2019. Media selanjutnya adalah media massa online Kompas.com (7 *trending news*), Liputan6.com (8 *trending news*), dan Detik.com (7 *trending news*).

Tabel 2
Nama Media



Tabel 3 menunjukan bahwa dari total 30 topik yang menjadi trending di media sosial dan media massa, sebanyak 56,7% berita memiliki tone negatif, 30% berita memiliki tone positif dan 13,3% berita bersifat netral.

Tabel 4
Tone Berita



Sumber data: Analisis Peneliti

Tabel 4 menunjukkan keberpihakan berita kepada pemerintah cenderung lebih tinggi yaitu menempati angka 40%, kemudian berita yang bersifat netral ada sebanyak 33%, dan yang mengarah keberpihakannya ke oposisi ada di angka 26%.

Tabel 5
Keberpihakan Media



Sumber data: Analisis Peneliti

Tabel 6
Judul Berita dan Topik yang menjadi Trending

Twitter	Kompas.com	Liputan6.com	Detik.com
#JokowiMundurlah	Pasukan Marinir Datang, Massa Perusuh Mundur dari Slipi	Situasi Terkini, Gedung Bawaslu Kembali Digeruduk Massa	Sisa-sisa Kebakaran di Gedung Bawaslu: Tembok Gosong dan Kaca Pecah
#TangkapPRABOWO	Sahur, Massa di Perempatan Sabang Tak Juga Bubar	Polisi Temukan Uang dan Amplop di Ambulance Partai Usai Kerusakan Asrama Brimob	Sisa Ricuh di Sabang Jakpus Semalam: Restoran Rusak, Tembok Dicoreti
#DukungPrabowo	Lewat Video, Prabowo Minta Pengunjuk Rasa Pulang dan Beristirahat	Penampakan Ambulance Partai Berisi Batu dan Uang dalam Kerusakan 22 Mei Dini Hari	Gerindra: Ketua dan Sekretaris DPP Tak Perintahkan Bawa Ambulans ke DKI

#TidakAtasNamaSaya	Rencana Penyerangan ke Jokowi, Kerusuhan 22 Mei	Aksi 22 Mei, Pemerintah Batasi Akses Media Sosial di Wilayah Tertentu	Momen Prabowo Jenguk Massa Pendemo di Bawaslu yang Terluka
#WhatsAppDown	Mengingat Kembali Janji Persahabatan Jokowi dan Prabowo	Kronologi Lengkap Kerusuhan Jakarta 22 Mei Dini Hari	Sebagian Pulang, 13 Korban Ricuh Masih Dirawat di RS Pelni
#InstagramDown	TNI AD Redam Massa di Sekitar Markas FPI Petamburan	Reaksi BPN Prabowo-Sandi Soal Kerusuhan 22 Mei	Redakan Massa di Slipi, Polisi Salawat Bareng Tokoh Masyarakat
#TangkapAmienRais	Kantor Polsek Tambelangan Ludes Dibakar Massa	Kata Polisi soal Pengakuan Sopir Ambulance Gerindra Bawa Batu di Rusuh 22 Mei	Prabowo Imbau Pendemo Hentikan Aksi
		Skenario Hingga Preman Bayaran di Balik Kerusuhan 22 Mei Dini Hari	

Sumber data: Analisis Peneliti

Hasil Hipotesis

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat adanya beberapa framing yang kesamaan dan perbedaan dari yang dibentuk khalayak dan media massa. Maka untuk membuktikan hal tersebut penelitian ini akan menggunakan Uji Independet T- Test dengan tujuan mengetahui signifikansi perbedaan framing yang digunakan oleh khalayak dan media massa. Hasil menunjukkan sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Analisis Uji T

Group Statistics				
Jenis Media	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Keberpikahan Media Sosial	8	1.6250	.51755	.18298
Media Massa	22	2.0455	.95005	.20255

Independent Samples Test										
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Keberpikahan	Equal variances assumed	10.440	.003	-1.181	28	.248	-.42045	.35609	-1.14988	.30897
	Equal variances not assumed			-1.540	23.103	.137	-.42045	.27296	-.98498	.14408

Sumber data: Analisis Peneliti

Hasil independent sampel tes didapatkan hasil Lavene's Test for Equality of Variances didapatkan $F= 10,440$ dan $p= 0,003$. Karena derajat $p < 0,05$ maka mengartikan bahwa kedua varian ini berbeda dan heterogen. Nilai t sebesar $-1,181$ untuk equal variance assumed, dan $-1,540$ untuk equal variances not assumed. Sedangkan nilai derajat kebebasan 28 dengan taraf signifikan $0,248$ yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

Hasil perhitungan ini memperlihatkan bahwa nilai t tidak signifikan, artinya framing khalayak di media sosial dan framing berita di media massa mainstream memiliki kesamaan pasca pemblokiran internet pada Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat 22 Mei 2019. Maka H_1 ditolak dan H_2 diterima.

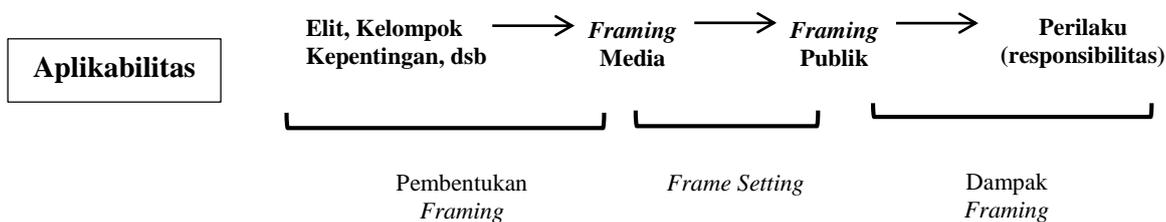
Pembahasan

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan antara *framing* khalayak di media sosial dan *framing* berita di media massa *mainstream* pasca pemblokiran internet pada Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat 22 Mei 2019. Hal ini bisa diartikan bahwa masyarakat terpengaruh dengan *framing* media massa mainstream karena hanya bisa mendapatkan informasi dari media massa *mainstream* karena akses media sosial seperti Whatsapp, Instagram, dan Facebook diputus sementara. Alhasil framing yang diciptakan masyarakat pada peristiwa Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat 22 Mei

2019 tidak memiliki perbedaan yang signifikan dari berita yang ada di media massa mainstream, karena khalayak memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi.

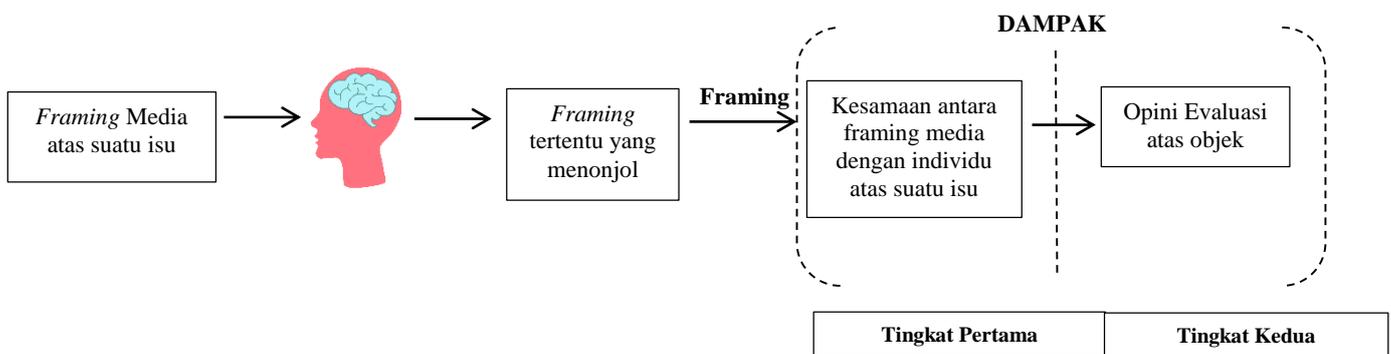
Hal ini terjadi karena framing berita di media massa mainstream dapat mempengaruhi individu dalam memproses kognisi yang terjadi dalam memori otak manusia. Proses ini disebut dengan aplikabilitas yang mana bekerja dengan mengaplikasikan skema framing yang sudah individu miliki sebelumnya ketika menerima dan memproses suatu pesan (Scheufele & Iyengar, 2014). Skema tersebut telah ada dan disimpan dalam memori jangka panjang individu, sebelum pesan diterima dan aplikabilitas bekerja melalui proses negosiasi. Pesan yang diterima tidak langsung berpengaruh kepada individu, tetapi dinegosiasikan dengan skema yang telah dipunyai sebelumnya (Scheufele & Iyengar, 2014)

Tabel 8
Aplikabilitas Framing



Menurut (Scheufele, 2000) framing media tidak berpengaruh secara langsung, bingkai dalam pemberitaan media tersebut akan dievaluasi dengan menggunakan bingkai atau skema yang dimiliki individu. Individu pada dasarnya sudah mempunyai pandangan atas suatu isu yang diperoleh lewat pengalaman atau pesan-pesan yang telah diterima sebelumnya. Pandangan atau skema tersebut akan dinegosiasikan dengan bingkai yang dibawa dalam pemberitaan media.

Tabel 9
Dampak Framing Media



Sumber data: Analisis Peneliti

Pemberitaan media mempunyai dua dimensi, yakni isu yang diberitakan dan bingkai berita tersebut atas suatu isu. Dimensi framing berita berdampak pada terjadinya kesamaan antara bingkai media dengan bingkai individu atas suatu isu. Terlebih jika dampak itu signifikan maka akan membentuk opini evaluasi atas suatu objek yang menjadi isu berita. Seperti halnya dalam kasus ini, framing yang dibentuk media memiliki kesamaan dengan framing individu terkait isu Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat. Jika framing yang diciptakan media massa terus mempengaruhi pada perilaku individu, maka dampak pada tingkatan kedua akan menjadikan individu membentuk opini publik atas suatu objek yang dievaluasi.

Pada dasarnya internet ditujukan sebagai teknologi yang memungkinkan terciptanya demokrasi dengan cara salah satunya mengkritisi pemerintah. Namun pasca internet di Indonesia dibatasi, hak untuk

mengekspresikan pendapat di media sosial terjejal dan menjadikan berkurangnya pengawasan dari masyarakat lewat media sosial. Seperti yang telah dikatakan oleh Schneir (2013) (Schneier, 2013 dalam Zaid, 2017) bahwa gambaran suram dari internet saat ini dan masa depan adalah perebutan kekuasaan di dunia maya yang dimenangkan oleh kekuatan institusional seperti pemerintah. Di negara-negara di mana pemerintah otoriter sulit diciptakan demokrasi yang stabil dalam sebuah rezim di era digital.

Dampak dari pembatasan media sosial ini telah merampas kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di internet. Negara Indonesia sebelumnya cenderung terbuka dengan kebebasan di internet, namun semenjak peristiwa Gerakan Kedaulatan Rakyat 22 Mei 2019 pemerintah cenderung represif dan membatasi kebebasan yang dimiliki rakyatnya. Hal ini tidak bisa dihindari karena lingkungan internet telah tunduk pada pengaruh dan kontrol aktor-aktor politik yang berpengalaman dan berusaha membela negara atau mempertahankan status quo. Dengan adanya pembatasan dalam mengakses informasi, maka kontrol negara terhadap akses internet telah membatasi utilitas perubahan sebuah negara.

Kontrol internet yang paling berat sering kali merupakan peraturan yang dibuat oleh negara (Deibert et al., 2008 dalam Gainous et al., 2016). Seperti yang terjadi pada peristiwa ini, pemerintah membatasi informasi yang tersedia, akibatnya kontrol negara terhadap internet di dalam suatu negara membatasi utilitas untuk perubahan. Hal ini dilakukan oleh pemerintah karena dalam situasi kritis internet dapat mengubah lanskap politik suatu negara seperti yang terjadi pada Arab Spring. Padahal peran dan fungsi internet dalam menerapkan demokrasi yang inklusif dapat memungkinkan aktivis dan politisi memiliki wadah baru untuk terlibat satu sama lain dan negara, dan dengan demikian, memperluas ruang politik sambil meningkatkan nilai-nilai dan kegiatan demokrasi (Allison, 2002 dalam Gainous et al., 2016). Maka dengan membatasi informasi yang tersedia, kontrol negara terhadap internet di dalam suatu negara membatasi utilitas untuk perubahan.

SIMPULAN

Dampak pemblokiran internet oleh pemerintah pada Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat 22 Mei 2019 telah membentuk framing khalayak dan framing media massa yang tidak jauh berbeda. Hal ini terjadi karena pemerintah membatasi akses di media sosial, sehingga masyarakat hanya dapat mendapatkan informasi di media massa mainstream dan sebagian kecil media sosial.

Pembatasan akses internet dianggap telah mencederai kebebasan dalam mendapatkan informasi di dunia digital. Hal ini menjadikan masyarakat terpaksa mengkonsumsi berita dari media massa mainstream yang memiliki kecenderungan mendukung pemerintah karena sebagian besar pemilik media di Indonesia memiliki afiliasi dengan pemerintah. Banyak masyarakat melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan minatnya seperti lewat *virtual privat network* (VPN) atau media sosial yang masih bisa diakses seperti Twitter. Namun, karena hanya sedikit orang yang mampu mengakses media sosial, sebagian besar masyarakat hanya mendapatkan informasi dari media massa mainstream maka framing yang tercipta oleh khalayak dan media massa memiliki kecenderungan tidak jauh berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Centre, F. W., Road, F., & Ec, L. (2013). *Freedom of expression and ICTs : Overview of international standards*.
- Du, Y. R. (2016). Same Events , Different Stories : Internet Censorship in the Arab Spring Seen From China. <https://doi.org/10.1177/1077699015606670>
- Entman, R. M. (1993). Framing : Toward Clarification of a Fractured Paradigm Super Relevant TIL. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58.
- Gainous, J., Wagner, K., & Gray, T. (2016). Internet freedom and social media effects: Democracy and citizen attitudes in Latin America. *Online Information Review*, 40(5), 712–738. <https://doi.org/10.1108/OIR-11-2015-0351>
- Goode, L. (2009). Social news , citizen journalism and democracy, 11(8), 1287–1305. <https://doi.org/10.1177/1461444809341393>
- Hemphill, L., & Heston, M. (2013). Framing in Social Media: How the US Congress Uses Twitter Hashtags to Frame Political Issues. *Ssrn*, (January). <https://doi.org/10.2139/ssrn.2317335>
- Hemphill, L., & Roback, A. J. (2014). Tweet Acts: How Constituents Lobby Congress via Twitter. *Proceedings of the 17th ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work & Social Computing - CSCW '14*, 1200–1210. <https://doi.org/10.1145/2531602.2531735>
- Howard, P. N., & Hussain, M. M. (2011). Digital Media and the Arab Spring, (December 2010), 1–11.
- Norris, P., Norris, M. G. L. C. P. P., Bennett, W. L., & Entman, R. M. (2001). *Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide*. Cambridge University Press. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=wfNPdyiwbyQC>
- Nurhajati, L., & Wijayanto, X. A. (2018). Framing Media Online Atas Pemberitaan Isu Politik Uang Dalam Framing Media Online Atas Pemberitaan Isu Politik Uang Dalam Pilkada Serentak 2018, (March 2019).
- Qin, J. (2015). Hero on Twitter, Traitor on News: How Social Media and Legacy News Frame Snowden. *International Journal of Press/Politics*, 20(2), 166–184. <https://doi.org/10.1177/1940161214566709>
- Scheufele, D. A. (2000). Agenda-Setting, Priming, and Framing Revisited: Another Look at Cognitive Effects of Political Communication. *Mass Communication & Society*, 5436(August 2014), 37–41. <https://doi.org/10.1207/S15327825MCS0323>
- Scheufele, D. A., & Iyengar, S. (2014). The State of Framing Research, 1(October 2014). <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199793471.013.47>
- Vreese, C. H. De. (2005). News framing: Theory and typology. *Information Design Journal*, 13(1), 51–62. <https://doi.org/10.1075/idjdd.13.1.06vre>
- Zaid, B. (2017). Internet and democracy in Morocco : A force for change and an instrument for repression, (December). <https://doi.org/10.1177/1742766515626826>

Buku:

- McQuail, D. (1992). *Media Performance: Mass Communication and the Public Interest*. Sage Publications (CA). Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=Cbx3GaYYp1oC>